Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

ISSN 3032-2529 (Media Online)
Volume 1, Nomer 1, Februari 2024

IMPLEMENTASI PROGRAM DATA INTEGRASI DESA BERDAYA (DIGDAYA) DALAM PENINGKATAN PELAYANAN BERBASIS DIGITAL

IMPLEMENTATION PROGRAM INTEGRATION OF THE EMPOWERED VILLAGE DATA (DIGDAYA) IN IMPROVING DIGITAL-BASED SERVICES

Oleh :
M. Fahrur Rouzy Arief[1)], Hadi Soetarto[2)], Nur Innah Alfiyah[3)]
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Madura,
E-mail : rouzyarief16@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the implementation of the Empowered Village Dataintegration (DIGDAYA) program in an effort to improve digital-based services at the village level. This program is designed to integrate data and information from various village service sectors in one integrated platform, with the aim of increasing the efficiency and accessibility of public services to rural communities. Nonetheless, this program succeeded in increasing access to and quality of services in several villages, especially in terms of administration and data management. The implementor's disposition, such as motivation, skill, and ability to adapt to technology, plays a key role in the successful implementation of this program. This program provides a deeper understanding of the challenges and potentials faced in the implementation of the Empowered Village Data Integration (DIGDAYA) program. The program also highlights the importance of developing human resources and technology infrastructure at the village level, as well as strengthening inter-organizational collaboration as a key step to increasing the success of this program.

Keywords: *Implementation of the Empowered Village Data Integration Program (DIGDAYA) Digital Bassed Service.*

Abstrak

Salah satu *leading sector* pembangunan ekonomi nasional Indonesia adalah pertanian. Sumber alam pertanian merupakan kekayaan negara dan bangsa, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. petani merupakan pelaku utama pembangunan sektor agraria di Indonesia yang termasuk golongan masyarakat rentan dengan kondisi ekonomi lemah, lemah dalam hal permodalan, penguasaan dan penerapan teknologi, dan seringkali juga lemah semangatnya untuk maju memperoleh kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pemberdayaan yang mengarah pada perbaikan dan penguatan yang dapat membawa sebuah dampak perubahan secara siknifikan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi para petani dataran tinggi.Melalui Program *Upland*, sektor pertanian di Indonesia dapat optimal dan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah menggunakan langkah paling utama dalam

sebuah penelitian untuk mendapatkan data yakni onservasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kata Kunci : Pembangunan pertanian, Pemberdayaan, dan Peningkatan Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Desa adalah salah satu roda penggerak pemerinthan yang terkecil dalam suatu daerah, tetapi memiliki kontribusi yang besar karena secara berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (https://www.panggungharjo.desa.id).

Teknologi saat ini sedang memberikan dampak yang besar dalam kehidupan manusia, teknologi tumbuh begitu pesat atau cepat, sehingga tidak ada manusia yang dapat menolak adanya teknologi. Dengan adanya teknologi di kehidupan manusia dapat memperbarui pola-pola perekonomian sampai pada pola pelayanan publik yang sebelumnya sangat tradisional menjadi lebih terbaru atau modern. Dengan perubahan pola tersebut terjadi di daerah perkotaan bahkan hingga pedesaan. Dengan adanya teknologi inernet memiliki manfaat yang baik pada suatu organisasi baik organissi publik maupun orgnisasi privat. Dengan kemajuan teknologi ini merubah pola pikir atau mindset masyarakat dalam mengembangkan kehidupan yang lebih baik, bahkan untuk mengatur pola kerja pemerintahaan supaya lebih efektif dan efisien. Banyak desa yang mulai gencar menerapkan *digital*isasi pada setiap unit kegiatan kerjanya, supaya dihrapkan pada setiap pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien. (https://media.neliti.com).

Program data integrasi desa berdaya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa dengan menggunakan teknologi digital. Program ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data yang diperlukan untuk pelayanan publik di tingkat desa, seperti data kependudukan, data kesehatan, data pendidikan, dan data lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di tingkat desa (https://jidt.org/index.php/jidt/article/view/212).

Dalam mengimplementasikan program data integrasi desa berdaya, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah desa, instansi pemerintah yang terkait, dan masyarakat di desa. Pemerintah desa harus memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang diperlukan sudah tersedia dan terpasang dengan baik di desa, serta memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait penggunaan sistem yang telah dibuat. Instansi pemerintah yang terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan harus menyediakan data yang diperlukan untuk program ini. Sedangkan masyarakat di desa harus berpartisipasi aktif dalam penggunaan sistem dan memberikan umpan balik yang berguna untuk pengembangan program ini.

Berdasarkan peraturan Bupati Sumenep No. 44 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Desa Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) di Kabupaten Sumenep bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa , perlu diatur Pedoman Sistem Informai Desa untuk mewujudkan data yang terintegrasi serta mendukung program Sumenep

Smart City dan *Smart Village*. Hal tersebut memudahkan dan membuat pelayanan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, namun apakah digdaya sebagai project *digital*isasi pelayanan desa sudah membantu dan dijalankan sepenuhya oleh pemerintah desa sebagai bentuk adaptasi dari percepatan teknologi yang saat ini bergerak begitu dinamis dan cepat.

Implementasi desa berdaya melalui upaya digitalisasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumenep masih mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Seperti pengajuan surat permohonan masyarakat mengalami beberapa kesulitan diantaranya proses lama, proses kurang efisien, alur yang kurang dimengerti dan terkadang tidak bisa mengurusya secara langsung. Sehingga untuk menyelesaikan ataupun mengurangi berbagai kesulitan tersebut perlu adanya *digital*sasi dalam pemerintahan, dengan kata lain *digital*isasi menjadi sebuah tuntutan sekaligus sebagai suatu solusi dalam permasalahan dan kesulitan masyarakat dalaam mengurus berbagai pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah mengeluarkan inovasi berupa layanan terpadu secara online berupa program DIGDAYA.
(http://www.sumenepkab.go.id)

Program pelayanan berbasis *digital* memang cukup belum dipahami oleh masyarakat Desa Pabian, oleh karena itu Pemerintah desa perlu mengupayakan bagaimana caranya masyarakat memahami dan menjalankan kebijakan pemerintah tentang proses pelayanan berbasis *digital*. Memang program seperti ini tidak akan diterima dengan mudah oleh masyarakat terutama dikalangan masyarakat yang sudah lanjut usia (lansia). Dari permasalahan tersebut pemecahan masalah akan dilakukan setelah penelitian lapangan, analisa data dan teori-teori yang relevan.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2008:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi

c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan

e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit

g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu

h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi

i) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah

j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

2.2 Implementasi Kebijakan

Teori Donald S. Van Meter dan Cari E. Van Horn (1975) Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni: standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

1) Standar dan Sasaran Kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Tujuan maupun sasaran program DIGDAYA dipahami dan diterapkan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

2) Sumberdaya.

Sumber daya yang dibutuhkan dalam pengimplementasian program DIGDAYA kompetensi implementor, fasilitas pendukung (sarana dan prasarana), dana yang dibutuhkan untuk implementasi program DIGDAYA.

3) Hubungan Antar Organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4) Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup strukturbirokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

5) Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi.

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi ligkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakeristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak: bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6) Disposisi Implementor.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2.3 Pelayanan Publik Digital

Menurut (Ari et al, 2021) Mengingat bagaimana pelaksanaan atau implementasi

e-Government yang sudah berkembang pesat di Indonesia dibandingkan dengan masa awal implementasi. E-Government merupakan mekanisme yang baik dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, swasta, atau pun dengan antara pemerintah itu sendiri. Pelayanan yang dibuat sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menciptakan kepuasan bagi penggunanya. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik berbasis digital yaitu :

a. Efisiensi sebagai kualitas informasi atau pelayanan yang disediakan dapat digunakan dengan mudah.
b. Reliabilitas sebagai kelayakan dan cepatnya untuk mengakses, menggunakan, juga menerima layanan
c. Kepercayaan sebagai indikator sejauh mana situs pelayanan dipercaya oleh masyakarat atau publik dan apakah pelayanan bisa aman dari gangguan juga melindungi informasi pribadi.
d. Dukungan masyarakat yang berdasar atas bantuan yang diberikan dari pelayanan kepada masyarakat, berkaitan antara masyarakat dengan aparat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar merupakan pedoman atau aturan yang ditetapkan untuk mengarahkan implementasi program DIGDAYA. Dalam konteks ini, standar dapat mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Standar Data Desa: Standar data desa mengacu pada format, klasifikasi, dan struktur data yang harus digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran data antar desa. Standar ini penting untuk memastikan konsistensi dan interoperabilitas data di seluruh desa yang terlibat dalam program DIGDAYA.
2. Standar Privasi dan Keamanan Data: Standar privasi dan keamanan data diperlukan untuk melindungi data pribadi dan memastikan bahwa data desa diakses dan digunakan dengan cara yang aman. Standar ini mencakup kebijakan dan prosedur yang mengatur perlindungan data, mekanisme enkripsi, akses terbatas, serta langkah-langkah keamanan untuk mencegah penyalahgunaan data.
3. Standar Pengelolaan Data: Standar pengelolaan data meliputi prosedur, kebijakan, dan praktik terkait pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemeliharaan data desa. Standar ini bertujuan untuk memastikan integritas, akurasi, dan kualitas data yang dikumpulkan, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data.

Sasaran Kebijakan:

Sasaran kebijakan adalah hasil yang ingin dicapai melalui implementasi

kebijakan dalam program DIGDAYA. Sasaran kebijakan yang diusulkan dapat mencakup:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Data Desa: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas data desa dan meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan. Dengan adanya sasaran ini, diharapkan desa-desa dapat mengumpulkan data yang lebih lengkap, akurat, dan terkini, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
2. Peningkatan Keterlibatan dan Partisipasi Desa: Sasaran ini berfokus pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat desa dalam program DIGDAYA. Sasaran ini dapat dicapai melalui pelibatan masyarakat dalam pengumpulan data, pemeliharaan data, serta penggunaan data dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa.
3. Peningkatan Efisiensi Pelayanan Berbasis Digital: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik berbasis digital di desa. Dengan menggunakan data yang terintegrasi, diharapkan proses pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan yang diberikan.
4. Peningkatan Kolaborasi Antar Pihak Terkait: Sasaran ini mengarah pada peningkatan kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, desa-desa, institusi pendidikan, lembaga riset, dan stakeholder terkait lainnya. Sasaran ini bertujuan untuk membangun sinergi antar organisasi dan memastikan kelancaran implementasi program DIGDAYA melalui pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman.
5. Peningkatan Pemanfaatan Data untuk Pengambilan Keputusan: Sasaran ini mengacu pada penggunaan data desa yang terintegrasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat desa. Dengan sasaran ini, diharapkan data dapat digunakan secara efektif dalam perencanaan pembangunan desa, pemantauan dan evaluasi, serta pengambilan keputusan strategis yang berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Melalui standar dan sasaran kebijakan yang diusulkan dalam implementasi program DIGDAYA, diharapkan pengelolaan data desa menjadi lebih terarah, efisien, dan bermanfaat bagi pembangunan desa secara menyeluruh. Standar akan memastikan konsistensi dan interoperabilitas data, sementara

sasaran kebijakan akan mengarahkan upaya pencapaian hasil yang diinginkan dalam program tersebut.

4.2 Sumberdaya

Dalam implementasi program Dataintegrasi Desa Berdaya (DIGDAYA), terdapat beberapa sumber daya yang diusulkan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program tersebut. Berikut adalah pembahasan mengenai sumber daya yang diusulkan:

1. Sumber Daya Manusia: Sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting dalam implementasi program DIGDAYA. Tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam teknologi informasi, manajemen data, analisis data, dan pemahaman tentang kebutuhan desa menjadi kunci untuk mengelola dan mengintegrasikan data dengan efektif. Pelatihan dan pengembangan keterampilan juga harus diberikan kepada petugas desa untuk memperkuat pemahaman mereka tentang pengelolaan data dan teknologi terkait.
2. Infrastruktur teknologi yang memadai menjadi sumber daya yang krusial dalam implementasi program DIGDAYA. Ini termasuk penyediaan akses internet yang terjangkau, stabil, dan handal di desa, instalasi jaringan komputer, server, dan perangkat keras lainnya yang diperlukan untuk mengelola dan menyimpan data desa. Infrastruktur teknologi yang memadai akan memastikan konektivitas yang baik antara desa-desa dan memfasilitasi pertukaran data yang efektif.
3. Sumber daya data yang diperlukan mencakup data administratif desa, data sosial-ekonomi, data lingkungan, dan data lainnya yang relevan dengan pembangunan desa. Dalam implementasi program DIGDAYA, penting untuk mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya data ini dengan baik. Data yang akurat, lengkap, dan terintegrasi akan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan desa yang efektif.
4. Selain sumber daya yang bersifat teknis, sumber daya pendukung masyarakat juga menjadi faktor penting dalam implementasi program DIGDAYA. Sukarelawan, kelompok masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dapat memberikan kontribusi dalam pengumpulan data, pelatihan, pendampingan teknis, dan dukungan sosial yang diperlukan untuk keberhasilan program. Kolaborasi dengan masyarakat desa

dan pihak-pihak terkait dapat memperkuat penerimaan dan partisipasi dalam program.

Dalam rangka implementasi program DIGDAYA, pengalokasian sumber daya yang tepat akan menjadi faktor kunci dalam kesuksesan program tersebut. Penting untuk mengidentifikasi, mengalokasikan, dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak untuk memastikan program berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi desa-desa di Indonesia.

4.3 Hubungan Antara Organisasi

Dalam implementasi program Dataintegrasi Desa Berdaya (DIGDAYA), hubungan antar organisasi yang baik menjadi faktor kunci dalam mencapai kesuksesan program tersebut. Berikut adalah pembahasan mengenai hubungan antar organisasi yang diusulkan dalam implementasi program DIGDAYA:

1. Kolaborasi dan Sinergi: Kolaborasi dan sinergi antar organisasi adalah elemen penting dalam implementasi program DIGDAYA. Organisasi yang terlibat, seperti pemerintah daerah, desa-desa, lembaga pendidikan, lembaga riset, dan organisasi non-pemerintah, harus bekerja sama secara aktif. Kolaborasi ini dapat mencakup pertukaran pengetahuan, pengalaman, sumber daya, dan praktik terbaik. Sinergi antar organisasi akan memperkuat efektivitas program dan mendorong inovasi serta pembelajaran bersama.

2. Forum Kolaborasi: Disarankan untuk membentuk forum kolaborasi antar organisasi yang terlibat dalam program DIGDAYA. Forum ini dapat menjadi wadah untuk berbagi informasi, pembaruan, dan koordinasi antar organisasi. Pertemuan rutin dapat diadakan untuk membahas kemajuan, tantangan, dan keputusan strategis terkait implementasi program. Forum kolaborasi ini akan memfasilitasi komunikasi yang efektif, meningkatkan pemahaman bersama, dan memperkuat hubungan antar organisasi.

Dengan hubungan antar organisasi yang kuat dan kolaboratif, implementasi program DIGDAYA akan mendapatkan dukungan yang lebih luas, sumber daya yang lebih banyak, dan sinergi yang meningkat. Hubungan yang baik antar organisasi akan meningkatkan efektivitas program, memperkuat kesinambungan, dan mengoptimalkan manfaat yang dihasilkan untuk desa-desa di Sumenep khususnya Desa Pabian

4.4 Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam implementasi program Dataintegrasi Desa Berdaya (DIGDAYA), terdapat beberapa

karakteristik agen pelaksana yang diusulkan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program tersebut. Berikut adalah pembahasan mengenai karakteristik agen pelaksana yang diusulkan:

1. Pengetahuan tentang Pengelolaan Data: Agen pelaksana dalam program DIGDAYA perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan data, termasuk proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data. Mereka harus memahami konsep dan praktik terkait data desa, termasuk standar data, kebijakan privasi, dan teknologi terkait. Pengetahuan yang kuat dalam pengelolaan data akan memastikan bahwa agen pelaksana dapat mengelola data desa dengan baik dan memanfaatkannya secara efektif.

2. Kemampuan Teknis: Kemampuan teknis merupakan karakteristik penting yang harus dimiliki oleh agen pelaksana dalam implementasi program DIGDAYA. Mereka harus memiliki keterampilan dalam penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terkait dengan pengelolaan data, seperti penggunaan sistem basis data, aplikasi analisis data, dan alat visualisasi data. Kemampuan teknis ini akan membantu agen pelaksana dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data secara efektif.

3. Kemampuan Komunikasi: Agen pelaksana perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mereka harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan berbagai pihak yang terlibat dalam program, termasuk masyarakat desa, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi lainnya. Kemampuan komunikasi yang baik akan memfasilitasi pertukaran informasi yang efisien, kolaborasi yang produktif, dan pemahaman yang saling menguntungkan antara agen pelaksana dan pihak lain yang terlibat.

4. Inovatif dan Kreatif: Agen pelaksana diusulkan memiliki sikap inovatif dan kreatif dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Mereka harus terbuka terhadap ide-ide baru, mencari solusi yang inovatif, dan mendorong adopsi teknologi baru yang relevan. Inovasi dan kreativitas akan membantu agen pelaksana dalam menemukan pendekatan yang lebih efektif

dan efisien dalam pengelolaan data desa.

5. Kesadaran Sosial dan Kepedulian: Agen pelaksana harus memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan kepedulian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Mereka harus mampu mendengarkan dengan baik, memahami kepentingan masyarakat desa, dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Kesadaran sosial dan keprihatinan akan membantu agen pelaksana dalam mengarahkan program secara inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa program DIGDAYA memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa.

Dengan karakteristik agen pelaksana yang kuat seperti pengetahuan tentang pengelolaan data, kemampuan teknis, kemampuan komunikasi, kemampuan manajemen proyek, inovatif dan kreatif, serta kesadaran sosial dan keprihatinan, implementasi program DIGDAYA dapat dilakukan dengan lebih efektif dan memberikan hasil yang positif bagi desa-desa di Kabupaten Sumenep.

4.5 Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Dalam implementasi program Dataintegrasi Desa Berdaya (DIGDAYA), terdapat beberapa aspek kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang diusulkan untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Berikut adalah pembahasan mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang diusulkan dalam implementasi program DIGDAYA:

1. Kesadaran dan Penerimaan Masyarakat: Program DIGDAYA membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat desa. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan data desa dan manfaatnya. Melalui kampanye informasi dan sosialisasi yang efektif, masyarakat desa dapat memahami tujuan program dan terlibat dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan data dengan kesadaran yang tinggi.
2. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat desa dalam program DIGDAYA sangat penting. Dalam implementasi program, perlu menciptakan mekanisme partisipatif seperti forum masyarakat, kelompok diskusi, atau pertemuan desa untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan,

pemantauan program, dan evaluasi. Partisipasi masyarakat akan memperkuat keberlanjutan program dan memastikan bahwa program DIGDAYA sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat desa.

3. Pembangunan Ekonomi Desa: Program DIGDAYA dapat menjadi alat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi desa. Melalui penggunaan data yang terintegrasi, desa-desa dapat mengidentifikasi peluang ekonomi, memperbaiki akses ke pasar, dan meningkatkan efisiensi sektor ekonomi desa. Dalam implementasi program, diperlukan upaya untuk mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan akses ke pembiayaan, dan memfasilitasi kerja sama ekonomi antara desa-desa.

Melalui pemahaman dan perhatian yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik, program DIGDAYA dapat dirancang dan diimplementasikan secara lebih efektif dan relevan dengan konteks desa. Fokus pada penerimaan masyarakat, inklusi, partisipasi, pembangunan ekonomi desa, dukungan kebijakan, dan keterlibatan pemerintah daerah akan memberikan landasan yang kuat untuk kesuksesan program dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa

4.6 Disposisi Implementator

Dalam implementasi program Dataintegrasi Desa Berdaya (DIGDAYA), disposisi implementor yang baik sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program tersebut. Disposisi implementor mengacu pada sikap, kualitas, dan karakteristik yang diusulkan untuk dimiliki oleh para pelaksana atau pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan program. Berikut adalah pembahasan mengenai disposisi implementor yang diusulkan dalam implementasi program DIGDAYA:

1. Kemampuan Beradaptasi: Implementor harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang terjadi selama implementasi program DIGDAYA. Karena program ini melibatkan aspek teknologi, kebijakan, dan partisipasi masyarakat, implementor perlu siap untuk menghadapi perubahan situasi, menguasai keterampilan baru, dan mengatasi hambatan yang mungkin timbul. Kemampuan beradaptasi yang baik akan memungkinkan implementor untuk tetap efektif dan produktif dalam menghadapi dinamika yang terjadi.

2. Keterampilan Komunikasi: Implementor harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam program DIGDAYA. Kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, mengomunikasikan ide dan informasi dengan jelas, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat desa, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi lainnya sangat penting. Implementor harus mampu menjelaskan manfaat program kepada masyarakat dan memastikan pemahaman yang tepat tentang tujuan dan proses program.

3. Kreativitas dan Inisiatif: Implementor perlu memiliki kreativitas dan inisiatif dalam menemukan solusi baru dan ide-ide inovatif yang dapat meningkatkan efektivitas program DIGDAYA. Mereka harus dapat berpikir di luar kotak, mencari cara-cara baru dalam mengumpulkan dan mengelola data desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Kemampuan untuk melihat peluang dan mengambil inisiatif akan memberikan keuntungan dalam menghadapi tantangan dan mencapai hasil yang lebih baik.

4. Kerjasama Tim: Implementor harus mampu bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan baik. Program DIGDAYA melibatkan berbagai pihak dan sektor yang berbeda, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga riset, dan masyarakat desa. Implementor perlu dapat bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan membangun sinergi antar tim untuk mencapai tujuan yang sama. Kemampuan untuk bekerja dalam tim akan memperkuat koordinasi, efisiensi, dan efektivitas implementasi program.

Dengan disposisi implementor yang baik, program DIGDAYA akan memiliki pelaksana yang kompeten, berdedikasi, berkomitmen, dan siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Disposisi implementor yang kuat akan meningkatkan kesuksesan program, memberikan manfaat yang signifikan bagi desa-desa, dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat desa yang berdaya..

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai Implementasi Program Data Integritas Desa Berdaya (DIGDAYA) Dalam Peningkatan Pelayanan Berbasis Digital telah mengalami perubahan yang signifikan khususnya pada segi pelayanan masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, berdasarkan fokus penelitian yaitu: (1)Standar dan Sasaran Implementasi, (2) Sumberdaya, (3) Hubungan Antara Organisasi, (4) Karakteristik Agen Pelaksana, (5) Kondisi

Sosial, Politik, dan Ekonomi, (6) Disposisi Implementator.

5.3 Saran

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Hubungan Antara Organisasi
4. Karakteristik Agen Pelaksana
5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi
6. Disposisi Implementator

DAFTAR PUSTAKA